

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SIPI KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

Yunus

yunus.fisip@gmail.com

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sipi Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dan pendukung efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Teknik penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa seperti peningkatan keterampilan masyarakat di bidang pertukangan, catering dan perlengkapan pesta perkawinan, usaha-usaha pengemukan sapi, untuk peningkatan pendapatan serta dapat terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat di desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya aparat desa dan kemampuan yang dimiliki aparat desa masih sangat kurang, kepemimpinan kepala desa yang tidak komunikatif dan tidak transparan terhadap unsur-unsur aparat desa lainnya. Faktor pendukung terdiri dari sumber daya alam yang cukup melimpah, subur dan strategis dari segi pertanian karena berada di dekat pegunungan, bersebelahan dengan air sungai besar serta sangat jauh dari pesisir pantai yang berkisar 10 KM dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berada di pinggir pantai sehingga memudahkan akses pemenuhan kebutuhan ekonomi khususnya bagi petani yang berada di Desa Sipi Kecamatan Sirenja.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja Pengelolaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi di letakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan

ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBD). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bergulirnya dana perimbangan melalui Dana Desa (DD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Dana Desa (DD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa tahun 2018 dengan anggaran mencapai Rp.976.085.000.00 untuk di Sipi Kecamatan Sirenja maka muncul

pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas, jangka waktu penerimaan pun masih tersendat dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola dana desa tersebut masih dipertanyakan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sipi masih belum maksimal karna tersendatnya dana desa yang turun di desa Sipi tujuan dari Dana Desa (DD) ini adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan, Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa (DD) yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa (DD) tepat sasaran sehingga ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: ‘Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena sehubungan dengan dikucurkannya Dana Desa tahun 2018 sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Informan penelitian ini adalah sebanyak 12 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Desa, Ketua BumDes., Tokoh masyarakat Aparat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi pemerintahan, Kaur pelaksana pembangunan.

Adapun teknik pengambilan sampel (informan) yakni secara sengaja (purposive sampling). Di mana yang menjadi informan dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu cara peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yakni:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.
2. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data/informasi melalui Tanya jawab secara langsung kepada informan.
3. Dokumentasi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa gambar, dokumendokumen, surat-surat, foto, laporan, buku catatan harian yang ada di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yakni Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data,

Melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data, Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data yang lebih mendalama, Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian, dan Setelah itu menuliskannya dalam bentuk laporan penelitian.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Pengelolaan keuangan desa menurut peraturan pemerintah no 8 tahun 2016 Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa efektifitas pengelolaan keuangan desa mulai dari peningkatan keterampilan, peningkatan pendapatan, terpenuhnya kebutuhan sosial ekonomi, peningkatan deskripikasi usaha kerja . Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governoance), Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang.

a. Peningkatan Keterampilan

Proses peningkatan keterampilan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masingmasing kegiatan. Peningkatan keterampilan oleh pemerintah desa Sipi adalah untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan masyarakat dalam berdaya saing untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM masyarakat sendiri agar tidak tergantung dari orang lain dan dengan cara ini masyarakat bisa menambah pengetahuan jika masyarakat tersebut

yang mempunyai keahlian dalam bidang, usaha-usaha pertukangan dan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan atau kursus, tidak menuntut kemungkinan masyarakat bisa mendirikan toko mebel. Begitu pula usaha-usaha Bumdes lainnya supaya dapat dimaksimalkan dengan skalah yang proritas.

b. Peningkatan Pendapatan

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui DD (dana desa) yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa tersebut. kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa Sipi dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan untuk pembangunan peningkatkan perekonomian. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka masyarakat yang terdapat di desa Sipi akan memiliki kesempatan untuk menerima lebih maju dan meningkatkan pendapatan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemerintah pusat dan menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di pedesaan. Namun, tidak menutup kemungkinan dari setiap pelaksanaan dilapangan tidak ada kendala pasti ada kendala namun masih bisa diatasi dengan melibtkan unsur aparat desa dan kmponen masyarakat lainnya.

c. Terpenuhinya Kebutuhan Sosial dan Ekonomi

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar desa tersebut bisa terangkat menjadi desa berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan desa-desa lain khususnya di kecamatan Sirenja Adapun penggunaan dana desa untuk terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat pemerintah desa mengadakan pengadaan, pengemukan sapi, alat-alat perlengkapan pesta perkawinan, imam masjid, insentif pemangku adat, insentif kader posyandu, insentif guru TK, Insentif kader pengajar pend.Agama. Dengan bgitu pemerintah desa telah melakukan peningkatan terpenuhnya kebutuhan sosial dan ekonomi agar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan Dana Desa yang dialokasikan oleh pemrintah lewat APBN.

d. Peningkatan Disverifikasi Usaha Kerja

Dalam peningkatan disverifikasi usaha kerja pemerintah Desa Sipi melalui BUMdes telah menjalankan usaha sosial/serving, bisnis penyewaan, usaha bersama/hoding, dll. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membantu masyarakat agar bisa berwirausaha secara mandiri Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu “melalui BUMdes masyarakat dapat membangun usaha kerja sendiri dengan di bantu dana desa melalui BUMdes. Peraturan

Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. untuk pengelolaan administrasi keuangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Desa Sipi dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Sipi sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana desa. Baik Pemerintah Desa Sipi jaya maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang efektifitas dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut.

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang dimaksud disini yaitu kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dalam mempengaruhi bawahannya dalam mengelola dana desa yang di peroleh dari APBdesa. Di bawah kepemimpinan bapak Tasdin, S.Sos selaku kepala desa Sipi bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala desa dan menjalankan tugas sebagai kepala desa Sipi. cukup baik, masyarakat dan perangkat desa dan unsur-unsur aparat lainnya dan tokoh masyarakat, merasa senang dan bahagia sebab kepemimpinan kepala desa lebih mengedepankan kebutuhan-kebutuhan

pokok demi untuk kesejahteraan masyarakatnya, tapi juga ada hal yang tidak direspon dengan baik para tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yaitu usaha pengemukan sapi, mengingat waktu cukup lama masa pemeliharanya dan juga cara berternaknya masih sifatnya secara teradisional dengan cara sapi ternak tersebut, dilapas di desa/ kampung, tanpa adanya barak yang disediakan oleh unsur pemerintah Desa.

b. Kebijakan Permerintah

Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti di ikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecah sesuatu masalah. Kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan kepala desa dalam menjalankan wewenangnya sebagai kepala desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa Sipi Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan desa Sipi, masyarakat dan perangkat desa merasa senang dan bahagia sebab kepemimpinan kepala desa mengedepankan dari kebutuhan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi satu hal yang membuat masyarakat kurang senang yaitu dengan menempatkan struktur perangkat-perangkat desa yang kebanyakan dari garis keluaranya sendiri. Dan kolega yang dekat.

c. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

mesti di ikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecah sesuatu masalah. Kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan kepala desa dalam menjalankan wewenangnya sebagai kepala desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa Sipi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kepala desa dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan APBDesa selalunya diawali dengan musyawarah mufakat. Dari kepala desa, perangkat desa BPD, tokoh tokoh masyarakat dan warga masyarakat lainnya selalunya melakukan rapat sebelum di lakukan pembangunan dan jika misalkan dalam pembangun itu bermasalah, maka pemerintah desa juga selalunya mengevaluasi. Dalam hal ini pemerintah melihat kesejahteraan masyarakat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

d. Kelembagaan

Kelembaga adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-sehari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu . Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Sipi memiliki Dua lembaga besar dalam Desa tersebut untuk menjalankan roda organisasi dalam membahas APBDesa selalunya melibatkan anggota legislatif desa tersebut.

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikut sertaan masyarakat dalam mengelola dan membangun desa untuk mencapai desa yang mandiri. Yang di bahas disini

adalah partisipasi masyarakat Desa Sipi dalam keikut sertaan dalam membangun desa tersebut. Melalui wawancara dari beberapa pihak antara lain Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi masyarakat itu ada, misalkan partisipasinya dengan pemikiran. Dalam partisipasi pembangunan desa masyarakat ikut serta di berdayakan dengan cara memberikan pekerjaan dengan diberi upah sebagai pembantu kontraktor. Jika hanya bekerja dalam membangun desa tanpa di beri imbalan apapun tentu masyarakat tidak ada yang ikut berpartisipasi.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Sipi sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan ketentuan yang berlaku. Kepala desa beserta jajarannya telah melakukan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dengan tujuan untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat untuk mencapai desa yang mandiri. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan non fisik dengan melakukan pelatihann pertukangan/ peningkatan keterampilan telah di lakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan untuk mendorong masyarakat yang mandiri, Adanya pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan fisik dengan membangun

jalan tani dan jalan dusun meningkatkan pendapatan masyarakat melalui catering dan penyewaan alat-alat perlengkapan pesta perkawinan, Melalui anggaran Dana Desa menjadikan masyarakat mendapatkan insentif- insentif dari catering dan perlengkapan pesta perkawinan.

- 2) Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan dana desa yaitu: Pengeluaran dana desa yang bertahap akhirnya pembangunan tidak bisa terselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, dan Adanya pertikaain dalam kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan pembangunan yang telah di rapatkan ada kalangan masyarakat yang menginginkan pembangunan atau program yang lain yang berskala prioritas untuk pemanfaatannya bantuan Dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S.A. (2011), *Pembangunan Pendesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Prosedur Penelitian...h. 227(Jakarta: Perpustakaan Umum,2004)h.41.. 231.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala, 2018, *Kecamatan Sirenja Dalam Angka 2018*
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019).
- Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9-20.
- Gaebler dan Osborne (1997) Efektivitas Pengalokasian Dana Desa DD
- Rosmawati (2015) Keberhasilan pembangunan Nasional
- Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Aprillia, 2014.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Moleong, Lexy J, 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf. J. E. Undap, Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015,
- Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (4) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penil Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa aian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaam Keuangan Desa Pasal 38 ayat (4).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 1 Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ayat (2).

Jurnal Pendidikan Ekonomi Haris, Dian Rasdianah, 2015. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari.

Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa Undang-Undang Pemerinth Daerah N0 32 Tahun 2014 Tentang Desa 8

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993)